

Peran Pemerintah bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Stefanus R. Seran¹, Paulina M. S. Gomes², Jeane Ivoni Bria³, Maria Selvania Piri⁴,
Enike Tje Yustin Dima⁵

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

bryajeane@gmail.com¹, rseran925@gmail.com², realvany@gmail.com³
paulinagomes272@gmail.com⁴

Submitted: 17th May 2025 | **Edited:** 27th June 2025 | **Issued:** 01st July 2025

Cited on: Seran, S. R., Gomes, P. M. S., Bria, J. I., Piri, M. S., & Dima, E. T. Y. (2025). Peran Pemerintah bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 988-993.

ABSTRACT

Economic growth remains a central benchmark in assessing national development, especially for emerging economies such as Indonesia. Despite its vast resources and demographic advantages, Indonesia continues to face structural challenges in achieving inclusive and sustainable growth. This study aims to analyze the role of government in promoting economic growth through strategic interventions in public investment, particularly in infrastructure, human capital development, MSME support, and fiscal governance. Using a qualitative literature review approach, the research synthesizes recent empirical findings from 2019 to 2024 drawn from national and international journal publications, policy reports, and institutional studies. The analysis is conducted through thematic categorization and comparative interpretation to explore how government-led policies impact GDP growth and the Human Development Index (HDI). The results show that targeted public spending in education, healthcare, and infrastructure significantly contributes to improving long-term economic productivity. Furthermore, fiscal policies are found to be most effective when accompanied by good governance practices, transparency, and institutional integrity. Government support for MSMEs and productive sectors also strengthens economic resilience, especially during periods of global uncertainty. The study concludes that integrated and accountable government interventions are essential for fostering inclusive, stable, and sustainable economic development in Indonesia.

Keywords: government role, economic growth, fiscal policy, infrastructure, human capital

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Di tengah dinamika global dan kompleksitas domestik, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah menjadi sangat vital dalam mendorong transformasi struktural ekonomi melalui intervensi kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor produktif, dan pengelolaan kebijakan fiskal (Alfons et al., 2024; Pratama & Widodo, 2022).

Indonesia memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti ketimpangan wilayah, rendahnya efisiensi belanja publik, dan lemahnya integritas institusional sering kali menjadi penghambat

optimalisasi peran pemerintah (Putri & Hadi, 2024; Khai & Lee, 2022). Meskipun alokasi anggaran untuk sektor strategis terus meningkat, tidak seluruhnya berdampak signifikan terhadap indikator pembangunan seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Yusuf & Rahman, 2023; World Bank, 2021).

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh efektivitas kebijakan publik, tata kelola fiskal, dan kapasitas kelembagaan (Adu & Marbuah, 2022; Nguyen et al., 2023). Namun demikian, kajian-kajian tersebut sering kali bersifat sektoral atau makro, tanpa memberikan gambaran yang terintegrasi mengenai bagaimana berbagai kebijakan pemerintah saling berinteraksi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pendekatan tinjauan pustaka terkini. Fokus utama kajian ini adalah menelaah bagaimana intervensi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, dukungan terhadap UMKM, serta kebijakan fiskal dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Harapannya, kajian ini dapat memberikan pemahaman mendalam sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

LANDASAN TEORI

Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Dalam perspektif ekonomi publik, peran pemerintah sangat penting dalam memperbaiki kegagalan pasar (market failures), menciptakan keadilan distribusi, serta mendorong pembangunan yang inklusif. Musgrave (1959) membagi fungsi pemerintah menjadi tiga: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks negara berkembang, fungsi ini diperluas untuk mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan barang publik strategis, dan perlindungan sosial (Tanzi, 2019).

Studi kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi oleh kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan (Oduro & Moffatt, 2021). Pemerintah dengan sistem birokrasi yang transparan dan responsif cenderung lebih mampu mengarahkan belanja publik secara produktif, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Behar & Mok, 2020). Di negara-negara Asia Tenggara, efisiensi birokrasi dan kontrol korupsi menjadi variabel kunci keberhasilan pembangunan (Chen & Lee, 2023).

Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Keterkaitan dengan Intervensi Pemerintah

Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang terutama ditentukan oleh faktor-faktor internal seperti akumulasi modal manusia, teknologi, dan inovasi (Romer, 1990). Dalam kerangka ini, intervensi pemerintah diperlukan untuk menyediakan insentif terhadap kegiatan produktif, investasi pendidikan, serta riset dan pengembangan.

Penelitian empiris membuktikan bahwa investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan dukungan terhadap sektor UMKM secara langsung mendorong peningkatan produktivitas nasional (Aziz & Wibisono, 2022). Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperkuat daya saing industri domestik (Yusof & Yew, 2021). Secara keseluruhan, pendekatan pertumbuhan endogen menempatkan pemerintah sebagai katalisator pembangunan, bukan sekadar regulator.

Kerangka Kebijakan Ekonomi dan Stabilitas Makro

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen utama dalam kerangka makroekonomi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Dalam kondisi ketidakpastian global, kebijakan fiskal ekspansif melalui belanja pemerintah diarahkan untuk merangsang permintaan agregat dan mengurangi dampak siklus ekonomi (Jayasooriya &

Bandara, 2023). Di sisi lain, stabilitas makroekonomi hanya dapat tercapai jika terjadi koordinasi yang sinergis antara kebijakan fiskal dan moneter (Adeniran et al., 2020).

Penelitian terbaru juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan ekonomi dengan isu pembangunan berkelanjutan, seperti transisi energi hijau, digitalisasi, dan inklusi keuangan (Kharisma & Setiawan, 2023). Dalam konteks Indonesia, penguatan kelembagaan fiskal, peningkatan efektivitas pengeluaran, dan digitalisasi layanan publik menjadi agenda utama reformasi ekonomi nasional (Siregar & Manurung, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji secara mendalam fenomena ekonomi makro yang melibatkan variabel kompleks, serta memberikan landasan konseptual yang kuat dalam merumuskan sintesis dan pemetaan isu (Snyder, 2019). Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, seperti artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan kebijakan pemerintah, buku akademik, dan publikasi lembaga internasional yang terbit antara tahun 2019 hingga 2024.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap utama, yaitu identifikasi literatur relevan, seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta penilaian kualitas referensi. Literatur yang dipilih adalah yang relevan dengan tema pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, infrastruktur publik, pengembangan SDM, dan peran pemerintah. Kriteria eksklusi meliputi referensi yang tidak melalui proses peer-review atau tidak relevan secara substantif terhadap fokus studi.

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik dan interpretatif, dengan mengelompokkan literatur berdasarkan kategori kebijakan: pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan terhadap UMKM, serta tata kelola fiskal. Selain itu, dilakukan analisis komparatif terhadap berbagai temuan untuk mengidentifikasi pola dan konvergensi pemikiran antarpenelitian (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2020). Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi antara kerangka teoretis dan bukti empiris yang mendukung tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Pembangunan Infrastruktur sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam mendorong konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Aksesibilitas transportasi, energi, dan digitalisasi terbukti meningkatkan produktivitas sektor riil dan memperkuat integrasi antarwilayah (Sari & Nugroho, 2023). Infrastruktur yang memadai juga menciptakan efisiensi logistik dan membuka peluang investasi baru, terutama di luar Jawa.

Penelitian oleh Kurniawan et al. (2022) menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki efek positif signifikan terhadap pertumbuhan PDB regional, khususnya di daerah tertinggal. Perbandingan dengan studi Sujarwo dan Fitriani (2021) menunjukkan bahwa daerah dengan belanja modal yang diarahkan secara tepat mengalami peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penurunan biaya distribusi hingga 25%. Hal ini menegaskan bahwa kualitas belanja publik menjadi determinan utama efektivitas pembangunan infrastruktur.

Investasi Pemerintah dalam Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas SDM menjadi agenda jangka panjang pemerintah untuk mendukung pertumbuhan berbasis produktivitas. Program seperti perluasan akses pendidikan, revitalisasi vokasi, dan peningkatan layanan kesehatan menjadi prioritas belanja sosial. Data dari Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan peningkatan alokasi APBN untuk sektor pendidikan mencapai lebih dari 20% dalam lima tahun terakhir.

Temuan Pratama dan Widodo (2022) memperlihatkan bahwa peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi kuat dengan peningkatan IPM dan produktivitas nasional. Temuan ini konsisten dengan studi Arifin dan Wahyuni (2021), yang menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% pada belanja pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan IPM sebesar 0,6 poin, dengan efek jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi.

Dukungan terhadap UMKM dan Sektor Produktif

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pemerataan ekonomi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM memberikan insentif pembiayaan, pelatihan digital, dan fasilitasi pasar bagi UMKM. Program *digital onboarding* yang diluncurkan sejak 2020 telah membantu lebih dari 20 juta UMKM bertransformasi ke platform digital (BKPM, 2023).

Studi oleh Lestari dan Maulana (2023) menunjukkan bahwa intervensi fiskal dalam bentuk subsidi bunga KUR dan pelatihan kewirausahaan meningkatkan kapasitas produksi UMKM hingga 35%. Di sisi lain, sektor produktif seperti agrikultur dan manufaktur juga mendapatkan stimulus melalui insentif pajak dan kemudahan regulasi. Perbandingan dengan penelitian Yusof dan Yew (2021) di Asia Tenggara menunjukkan pola intervensi serupa dalam membangun ketahanan ekonomi domestik berbasis UMKM.

Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi

Kebijakan fiskal berperan sebagai alat stabilisasi sekaligus akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pemerintah menerapkan strategi fiskal ekspansif untuk mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi. Belanja negara diarahkan pada program padat karya, perlindungan sosial, dan stimulus fiskal sektoral (Kemenkeu, 2023).

Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada tata kelola anggaran. Penelitian oleh Putri dan Hadi (2024) menunjukkan bahwa penguatan pengawasan dan efisiensi belanja meningkatkan dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh studi internasional (Jayasooriya & Bandara, 2023) yang menyatakan bahwa negara dengan transparansi anggaran tinggi memiliki multiplier fiskal dua kali lebih besar dibanding negara dengan indeks korupsi tinggi.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terbukti bersifat strategis dan multidimensional, mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, pengembangan sektor UMKM, serta kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika makroekonomi. Intervensi kebijakan di bidang-bidang tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan global.

Namun demikian, efektivitas intervensi pemerintah sangat bergantung pada kualitas tata kelola, efisiensi alokasi anggaran, dan integritas institusional. Belanja publik yang tinggi tidak akan berdampak optimal tanpa perbaikan dalam hal transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan digitalisasi sistem fiskal menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan dampak kebijakan terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang.

Kontribusi utama studi ini adalah memberikan pemetaan tematik yang komprehensif mengenai dimensi-dimensi strategis peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, berdasarkan sintesis literatur terkini. Temuan ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi antar sektor dan lintas institusi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Implikasi kebijakan dari studi ini mengarah pada perlunya harmonisasi antara strategi pembangunan sektoral dengan penguatan institusi publik. Pemerintah perlu memperluas ruang fiskal yang berkualitas serta meningkatkan kapabilitas birokrasi agar dapat mengelola perubahan struktural secara berkelanjutan dan berbasis keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeniran, A., Yusuf, A., & Shittu, A. (2020). Coordinating fiscal and monetary policy for inclusive economic growth in developing countries. *Journal of Development Economics*, 8(2), 142–157.
- Adu, D., & Marbuah, G. (2022). Government expenditure and economic growth: Does the role of corruption control matter? *Journal of Economic Studies*, 49(5), 965–982.
- Alfons, Y., Widyastuti, U., & Rahayu, M. (2024). Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 34–46.
- Arifin, M., & Wahyuni, I. (2021). Pengaruh belanja pemerintah pada sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Ekonomi Publik*, 12(2), 155–170.
- Aziz, R., & Wibisono, Y. (2022). Peran belanja pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Nasional*, 17(1), 88–101.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). *Laporan Perkembangan UMKM dan Investasi Nasional 2020–2023*. Jakarta: BKPM.
- Behar, A., & Mok, J. (2020). Improving public service delivery through bureaucratic reform: Evidence from Asia. *Public Administration Review*, 80(4), 611–622.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2020). Literature reviews and the hermeneutic circle. *Australian Academic & Research Libraries*, 51(3), 216–229.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- Chen, Y., & Lee, S. M. (2023). Bureaucratic quality, corruption, and government effectiveness in Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science*, 31(1), 33–51.
- Cooper, H. (2019). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Jayasooriya, D., & Bandara, W. (2023). Fiscal expansion and macroeconomic resilience in the post-pandemic era: Insights from developing economies. *Journal of Asian Economics*, 85, 101518.
- Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2022). *Doing your literature review: Traditional and systematic techniques* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Realisasi APBN dan Evaluasi Kinerja Fiskal 2022–2023*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Khai, H. V., & Lee, K. H. (2022). Government social spending and human development inequality: Cross-country evidence. *Social Sciences*, 11(3), 127–141.
- Kharisma, B., & Setiawan, T. (2023). Integrasi kebijakan fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Negara*, 14(2), 167–182.
- Kurniawan, D., Hidayat, A., & Prasetyo, T. (2022). Dampak belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 14(1), 45–61.
- Lestari, S., & Maulana, A. (2023). Peran kebijakan fiskal dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 18(2), 98–112.

- Nguyen, T. H., Tran, M. Q., & Hoang, P. T. (2023). Economic policy, technological innovation, and green growth: Empirical evidence from Asia-Pacific countries. *Sustainability*, 15(4), 2105.
- Oduro, I., & Moffatt, D. (2021). Public sector governance and economic transformation in sub-Saharan Africa. *Economic Governance Review*, 7(3), 45–61.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2020). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Pratama, A., & Widodo, T. (2022). Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia: Pendekatan sektor infrastruktur dan digitalisasi. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 19(3), 215–230.
- Putri, M. S., & Hadi, R. (2024). Efisiensi belanja publik dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–60.
- Sari, D., & Nugroho, B. (2023). Peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 21(2), 98–112.
- Siregar, H., & Manurung, A. (2021). Reformasi fiskal dan penguatan kelembagaan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Negara*, 12(1), 23–39.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sujarwo, A., & Fitriani, N. (2021). Analisis efektivitas belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Anggaran*, 10(3), 134–149.
- Tanzi, V. (2019). The changing role of the state in the economy: A historical perspective. *International Economics and Policy Review*, 6(2), 10–24.
- Torraco, R. J. (2020). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 19(1), 86–96.
- World Bank. (2021). *Improving human capital through effective public spending*. Washington, DC: The World Bank Group.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112.
- Yusof, Z., & Yew, S. T. (2021). Enhancing industrial competitiveness through strategic state intervention: Lessons from East Asia. *Policy and Development Journal*, 11(4), 245–263.
- Yusuf, A., & Rahman, F. (2023). Pengaruh belanja sosial terhadap peningkatan IPM di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional dan Fiskal*, 18(4), 223–235.